

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang merupakan bagian awal dari suatu penelitian. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan timbulnya alasan-alasan masalah yang diteliti, rumusan masalah yang menjelaskan mengenai batasan inti permasalahan yang akan dipecahkan, tujuan dan manfaat penelitian yang dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, serta definisi operasional yang digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman persepsi.

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, kota akan tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kawasan perkotaan. Hal ini tentu saja dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan kota, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang mobilitasnya.

Kawasan perkotaan merupakan pusat aktivitas sosial ekonomi dan aglomerasi penduduk yang menyediakan berbagai fasilitas. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kawasan perdesaan yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan fasilitas. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa:

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan kawasan perkotaan dipengaruhi oleh adanya interaksi antar satu kota dengan kota lain atau kawasan *hinterland*-nya. Interaksi ini berwujud sebagai suatu bentuk sistem kota-kota, yang akan terjadi apabila dipandang dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Interaksi terjadi melalui pergerakan barang, jasa, bahan, manusia dan kapital. Interaksi mempunyai peranan penting dalam pembentukan pola dan struktur kota-kota serta dalam merangsang perkembangan kawasan perkotaan. Dalam suatu sistem kota-kota, kota menjadi unsur atau elemen utama dan merupakan simpul-simpul (*nodes*), sedangkan hubungan atau interaksi antar simpul ini merupakan faktor pembentuk sistem, dan akan berwujud sebagai aliran-aliran dalam suatu jejaring (Pontoh, 2009: 124).

Seiring dengan pesatnya aktivitas sosial ekonomi penduduknya, Kecamatan Kadipaten sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka juga menunjukkan adanya perkembangan kawasan perkotaan dari waktu ke waktu. Kawasan perkotaan ini timbul akibat adanya interaksi antara Kecamatan Kadipaten dengan kawasan *hinterland* dan dengan kecamatan lain di Kabupaten Majalengka terutama dalam sektor perdagangan dan jasa.

Kawasan Perkotaan Kadipaten terdiri dari 15 desa yang tersebar di tiga kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Dawuan, dan Kecamatan Kasokandel dengan luas wilayah sebesar 40,33 km². Berdasarkan data kependudukan dari Profil Desa dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka, dapat diketahui bahwa penduduk Kawasan Perkotaan Kadipaten setiap tahunnya mengalami perkembangan. Perkembangan penduduk tersebut

dapat dilihat dari perubahan jumlah dan kepadatan penduduk setiap desa pada periode tahun 1998-2009 seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Penduduk Kawasan Perkotaan Kadipaten Periode 1998-2009

No.	Nama Desa	Luas (km ²)	Tahun 1998		Tahun 2009	
			Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan
1	Kadipaten	2,44	12.015	4.924	11.495	4.711
2	Liangjulung	2,02	8.931	4.421	9.501	4.703
3	Heuluet	5,76	5.165	897	5.966	1.036
4	Cipaku	4,36	1.878	431	2.073	475
5	Pagandon	2,95	4.134	1.401	4.798	1.626
6	Karangsambung	4,53	7.160	1.581	7.493	1.654
7	Babakan Anyar	0,92	2.124	2.309	2.090	2.272
Kecamatan Kadipaten		22,98	41.407	1.802	43.416	1.889
8	Dawuan	1,07	4.915	4.593	4.554	4.256
9	Bojongcideres	1,01	2.620	2.594	3.185	3.153
10	Genteng	3,98	4.836	1.215	5.068	1.273
11	Gandu	2,87	4.439	1.547	5.068	1.766
Kecamatan Dawuan		8,93	16.810	1.882	17.875	2.002
12	Gandasari	1,55	2.361	1.523	2.675	1.726
13	Girimukti	2,13	3.672	1.724	4.342	2.038
14	Jatisawit	3,26	1.877	576	2.133	654
15	Leuwikidang	1,48	3.766	2.545	4.086	2.761
Kecamatan Kasokandel		8,42	11.676	1.387	13.236	1.572
Σ		40,33	69.893	1.733	74.527	1.848

Sumber: Profil Desa dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Perubahan jumlah dan kepadatan penduduk tersebut, tentunya dapat memberikan implikasi pada aspek fisik kota baik dari segi luas kota maupun infrastruktur yang terdapat di suatu kota. Hal inilah yang memengaruhi perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten hingga menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Majalengka.

Dalam pengembangan sistem kota-kota dan sistem kegiatan pembangunan, menurut Struktur Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kadipaten yang berada di bawah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung dan PKN Cirebon,

serta di antara PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran. Peranannya pada tingkat nasional menjadi bertambah akibat adanya rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, rencana pembangunan jalan tol, serta rencana penambahan jalur kereta api yang menghubungkan Rancaekek-Cirebon.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka tahun 2005-2015, ditetapkan bahwa Kawasan Perkotaan Kadipaten merupakan kawasan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Kabupaten Majalengka. Dengan diembannya fungsi dan peranan tersebut, secara tidak langsung hal ini akan memberikan dampak terhadap perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten. Fenomena perkembangan yang nampak di Kawasan Perkotaan Kadipaten salah satunya dapat dilihat dari perkembangan demografis yang meliputi jumlah dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, serta perkembangan infrastruktur kawasan perkotaan (Kabupaten Majalengka dalam Angka, 2009).

Fenomena perkembangan lainnya dapat dilihat dari perubahan penggunaan lahan. Saat ini, lahan di Kawasan Perkotaan Kadipaten telah banyak yang beralih fungsi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan tampak bangunan-bangunan baru serta kompleks perumahan.

Fenomena perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten di atas, tentunya sangat berbeda dengan fenomena perkembangan Kota Majalengka sebagai Ibukota Kabupaten. Dijumpai di lapangan bahwa kondisi Kota Majalengka tampak lenggang dan sepi, padahal Kota Majalengka sebagai Ibukota Kabupaten seharusnya memiliki aktivitas kota dan mobilitas penduduk yang tinggi.

Sebaliknya, Kawasan Perkotaan Kadipaten yang merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Majalengka memiliki tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Hal tersebut merupakan faktor pendukung yang menjadikan kawasan ini lebih berkembang dari pada kawasan lain sehingga dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Majalengka.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji fenomena perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten, terutama yang berkenaan dengan perkembangan Pusat Kegiatan Wilayah Kadipaten di Kabupaten Majalengka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis memfokuskan kajian pada “Analisis Perkembangan Pusat Kegiatan Wilayah Kadipaten di Kabupaten Majalengka”. Adapun permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten pada periode 1998-2009?
2. Faktor-faktor geografis apa saja yang memengaruhi perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten pada periode 1998-2009;
2. Menganalisis faktor-faktor geografis yang memengaruhi perkembangan Kawasan Perkotaan Kadipaten.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Memberikan alternatif atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan Pusat Kegiatan Wilayah Kadipaten;
2. Dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, khususnya pada pokok bahasan Pola Keruangan Desa – Kota di SMA sub pokok bahasan Interaksi Desa – Kota;
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan yang bersifat kegeografian bagi mahasiswa yang mempelajarinya.
4. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis akan memberikan penjelasan tentang konsep yang terkandung dalam penelitian ini.

1. Analisis adalah penelaahan atau penguraian atas data sehingga menghasilkan simpulan-simpulan (Surya, 2009: 6).
2. Perkembangan memiliki arti yang sama dengan berkembang, yang berarti terbuka atau terbentang menjadi luas dan besar, suatu keadaan menjadi banyak (Poerwadarminta, 2005: 473).

Perkembangan kota adalah suatu proses keadaan perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan lain dalam waktu yang berbeda. Sorotan perubahan tersebut biasanya didasarkan pada waktu yang berbeda dan analisis ruang yang sama (Yunus, 1978: 1).

Perkembangan dalam penelitian ini dikaji berdasarkan perkembangan penggunaan lahan, infrastruktur kota, serta kondisi sosial ekonomi penduduk Kawasan Perkotaan Kadipaten pada periode 1998-2009. Infrastruktur yang diteliti meliputi infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur peribadatan, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur transportasi. Kondisi sosial ekonomi penduduk yang menjadi bahan kajian meliputi kondisi demografi, mata pencaharian, tingkat pendidikan, dan gaya hidup.

3. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Kawasan Perkotaan Kadipaten adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah Kadipaten (PKW Kadipaten) yang meliputi seluruh Kecamatan Kadipaten, sebagian Kecamatan Dawuan dan sebagian Kecamatan Kasokandel.

4. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat pengolahan atau pengumpulan barang yang melayani beberapa kabupaten, simpul transportasi untuk beberapa kabupaten serta pusat pelayanan jasa lain untuk beberapa kabupaten (Dinas BMCK, 2006: 3).

